

# Solmadapar Ditantang F-PDIP

## Usulan Demokrat, Lebih Cerdas

*Ratusan kasus senilai Rp 156 miliar dalam APBD Kalbar 2010 telah diungkapkan BPK. Kelompok demonstran mengkritisi. Legislator merespons. Siapa yang jadi mafia anggaran?*

PONTIANAK. Aksi demonstrasi Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) yang meminta pengusutan mafia anggaran di Gedung DPRD Kalbar, berujung panjang. Fraksi PDIP yang malah kelimpungan.

"Siapa orangnya, tunjukkan. Kalau mau membuktikan kebenaran, jangan takut. Kalau memang ada oknum Badan Anggaran yang main mata dan segala macam, tunjukkan, adili secara hukum," kata Krisantus Kurniawan, anggota Fraksi PDIP Kalbar kepada wartawan, Jumat (7/10).

Krisantus meyakinkan tidak ada mafia anggaran di lembaga terhormat itu. Bahkan menantang para aktivis mahasiswa untuk menunjuk hidung oknum dewan yang diduga sebagai mafia anggaran.

Mantan Ketua DPRD Sanggau ini menyayangkan aksi Solmadapar yang dipandang tidak santun. Terlebih lagi dengan adanya pernyataan para demonstran yang menyebutkan 'Gubernur Zinahi DPRD Lahirkan Mafia Anggaran'

Krisantus menegaskan, kata-kata itu cenderung mendiskreditkan seseorang dan tidak pantas disampaikan elemen mahasiswa. Karena itu, ia menyarankan agar Solmadapar lebih santun serta dapat memberi saran-saran yang konstruktif.

Dijelaskan dia, apabila aspirasi yang disampaikan menggunakan cara-cara santun, maka DPRD akan lebih akomodatif. "Lain kali jangan menghujat orang seperti itu. Apa yang mereka maksud dengan gubernur menzinahi DPRD? Tidak pernah ada gubernur menzinahi DPRD, DPRD pun tidak merasa dizinahi," tegas Krisantus lagi.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalbar, Ary Pudyanti justru merespons positif dan lebih cerdas terhadap kritikan dugaan adanya mafia anggaran yang muncul setelah adanya temuan BPK RI terhadap APBD 2010 senilai Rp 156 miliar. "Reko

■ Halaman 7

## Solmadapar Ditantang ..... dari halaman 1

mendasi itu harga mati. Dan harus ditindaklanjuti pemerintah provinsi," katanya.

Selain itu, Ary menyarankan agar di DPRD Kalbar dibentuk Badan Akuntabilitas Keuangan Daerah seperti yang ada di DPR RI. Badan itu nantinya dapat dibantu oleh akuntan, ahli, analis keuangan dan peneliti. Badan itu nantinya bisa dijadikan ditetapkan sebagai alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap.

Dia menjelaskan, tugas dari Badan Akuntabilitas itu nantinya untuk melakukan telaah terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPRD. Selanjutnya menyampaikan hasil penelaahan itu kepada komisi-komisi.

"Kemudian, melanjutkan

hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan atas permintaan komisi. Tugas Badan Akuntabilitas ini juga nantinya bisa mengusulkan kepada komisi agar BPK melakukan pemeriksaan lanjutan," jelas Ary.

Dia menambahkan, dengan adanya Badan Akuntabilitas ini nantinya bisa memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. "Hasil kerja Badan Akuntabilitas ini nantinya disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna," tuntas Ary.

Seperti diketahui, paripurna pandangan umum

Fraksi-Fraksi di DPRD Kalbar terhadap perubahan APBD 2010 dalam paripurna di Balairung Sari DPRD Kalbar, Selasa (4/9) diwarnai aksi demonstrasi. Sejumlah mahasiswa dari Solmadapar menuntut penegak hukum membongkar mafia anggaran di provinsi itu.

Aksi para mahasiswa itu menyusul temuan BPK RI Perwakilan Kalbar terhadap kerugian keuangan pada Pemprov Kalbar sebesar Rp 156 miliar dan temuan nilai aset yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Bahkan aksi mahasiswa tersebut sempat terjadi keributan antara legislator Kalbar dengan para pendemo yang jumlahnya sekitar sepuluh orang itu. (jul)